



Article Informations
Corresponding Email:
Hendraanugrahhhh@gmail.com

Received: 10/02/2025; Accepted:
20/02/2025; Published: 30/06/2025

UPAYA PEMERINTAH QATAR DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN MENJELANG PIALA DUNIA FIFA 2022

Hendra Anugrah Ramadhan¹⁾, Yuswari O. Djemat²⁾, Nala Nourma
Nastiti³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Pada tahun 2010, *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) telah memilih Qatar menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022. Untuk mempersiapkan Piala Dunia FIFA 2022, Qatar merenovasi 12 stadion dan akan membangun Sembilan stadion baru. Pemerintah Qatar merekrut besar besaran pekerja migran dari berbagai negara untuk pengembangan infrastruktur. Perekrutan tersebut harus mengalami proses yang dipengaruhi oleh sistem kafala yang mana menjadi pemicu bagi pelanggaran hak pekerja migran di Qatar. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan konsep *human security* untuk menjelaskan upaya pemerintah Qatar dalam melindungi hak hak pekerja migran menjelang piala dunia FIFA 2022.

Untuk melindungi hak pekerja migran, Qatar berupaya bekerjasama dengan ILO dan FIFA dalam mengawasi hak pekerja migran. Selain itu, Qatar juga menerapkan Undang-Undang dan kebijakan baru tentang ketenagakerjaan. Qatar juga Membentuk komite Pengaduan izin keluar negara untuk pekerja migran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian bahwa masih banyak pekerja migran yang mengalami hak nya tidak terpenuhi seperti telat penerimaan upah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang tidak mematuhi regulasi.

Kata Kunci: Qatar, FIFA, Pekerja migran, Pelanggaran hak

Abstract

In 2010, Federation Internationale de Football Association (FIFA) selected Qatar to host the 2022 FIFA World Cup. To prepare for the 2022 FIFA World Cup, Qatar renovated 12 stadiums and will build nine new stadiums. The Qatari government is massively recruiting migrant workers from various countries for infrastructure development. The recruitment must undergo a process that is influenced by the kafala system which is a trigger for violations of migrant workers' rights in Qatar. To explain the phenomena that occur, researchers use the concept of human security to explain the Qatari government's efforts to protect the rights of migrant workers ahead of the 2022 FIFA world cup.

To protect the rights of migrant workers, Qatar seeks to cooperate with the ILO and FIFA in overseeing the rights of migrant workers. In addition, Qatar is also implementing new laws and policies on labor. Qatar also established a complaint committee for out-of-country permits for migrant workers. However, the facts on the ground show a discrepancy that there are still many migrant workers who experience unfulfilled rights such as late receipt of wages. The reality on the ground shows that many companies do not comply with regulations.

Keyword: Qatar, FIFA, Migrant workers, Rights violations

PENDAHULUAN

Pada tahun 2010, *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) telah memilih Qatar menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022. Piala Dunia atau yang secara resmi dikenal *FIFA World Cup* adalah turnamen sepak bola yang dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahunan untuk menentukan juara dunia dalam olahraga sepak bola. Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930. (Wawan, 2022). Qatar telah menunjuk 7 kota tuan rumah dan 12 stadion yang menjadi lokasi pertandingan digelar, sehingga dapat mencapai persyaratan standar FIFA untuk ajang tersebut. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Piala Dunia Qatar 2022 juga telah dimulai. Tiga dari 12 stadion hendak direnovasi dan akan membangun Sembilan stadion baru. Proses konstruksi yang signifikan akan membawa pertimbangan manfaat, khususnya dalam hal kesiapan stadion, pengujian dalam kondisi yang sebanding dengan Piala Dunia FIFA dan penerapan langkah-langkah pengendalian iklim di stadion seukuran Piala Dunia FIFA. Untuk mempersiapkan mega sport event ini telah diproyeksikan anggaran pembangunan dan renovasi stadion sebesar USD 3 miliar (Mayne, 2010). Menjadi tuan rumah Piala Dunia memberikan platform bagi Qatar untuk meningkatkan profil dan pengaruhnya di percaturan politik

dan ekonomi global (Brannagan, 2016). Hal ini sejalan dengan ambisi Qatar untuk memposisikan dirinya sebagai pusat kekuatan di Timur Tengah. Penyelenggaraan Piala Dunia juga merupakan kesempatan bagi Qatar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan sektor-sektor ekonomi lainnya, yang dapat mendukung diversifikasi ekonominya yang masih sangat bergantung pada sektor energi (Aljazeera, 2022).

Lalu, Melalui Piala Dunia, Qatar berusaha meningkatkan *soft power*-nya dengan memproyeksikan citra positif negara, budaya, dan nilai-nilai Islam moderat ke dunia internasional (Khatib, 2013). Hal ini merupakan bagian dari strategi Qatar untuk mempengaruhi opini publik global. Qatar juga menjadikan Piala Dunia sebagai platform untuk mempromosikan isu-isu keadilan dan kesetaraan, seperti hak pekerja migran dan isu lingkungan, sebagai bagian dari upaya membangun citra positif di panggung global (Dorsey, 2022). Menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar, kondisi pekerja migran di negara tersebut menjadi sorotan internasional. Meskipun pemerintah Qatar telah melakukan beberapa reformasi, namun masih terdapat laporan tentang pelanggaran hak-hak pekerja migran dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur untuk event tersebut. Pemerintah Qatar merekrut sekitar 1,5 juta pekerja migran yang sebagian besar berasal dari negara Kawasan Asia Selatan seperti Pakistan, India, dan Bangladesh. Pada tahun 2019, jumlah pekerja migran di Qatar melebihi dua juta pekerja yang setara dengan 95% dari total jumlah pekerja di Qatar (Human Rights Watch, 2019). Para pekerja migran harus bekerja dengan jam kerja yang panjang dengan beban kerja yang berat, terlebih dibawah terik matahari yang menyengat di Qatar (Amnesty International, 2021). Pekerja migran yang masuk ke Qatar menjelang Piala Dunia FIFA 2022 mengalami proses yang dipengaruhi oleh sistem kafala, di mana mereka harus mendapatkan sponsor dari majikan sebelum berangkat. Sistem ini mengharuskan pekerja migran untuk memiliki sponsor yang bertanggung jawab atas mereka selama tinggal dan bekerja di Qatar.

Meskipun Qatar telah melakukan beberapa reformasi untuk melindungi hak-hak pekerja, banyak kritik muncul terkait pelanggaran hak

asasi manusia dan kondisi kerja yang buruk selama persiapan untuk Piala Dunia. Sebagian besar pekerja migran berasal dari Nepal, Bangladesh, India, Sri Lanka, dan Pakistan. Pada bulan Maret 2021, The Guardian melaporkan bahwa sekitar 6,500 pekerja migran meninggal sejak Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Pekerja migran tersebut berasal dari negara seperti India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka (The Guardian, 2021). Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat sekitar 12 pekerja migran yang meninggal di Doha dalam seminggu yang berasal dari negara Asia Selatan ketika Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Data dari India, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka menunjukkan sekitar 5,927 kematian dari tahun 2011 hingga 2020 (Owens, 2021). Upah yang mereka dapatkan juga sangat rendah dan bahkan seringkali tidak mendapatkan upah tepat waktu bahkan tidak mendapat upah sama sekali. Para majikan atau sponsor juga sering kali membatasi kebebasan bergerak para pekerja migran dengan menyita paspornya (Amnesty International, 2020). Mereka juga tinggal di pemukiman yang padat dengan kondisi tidak layak huni dengan kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai. Dengan segala kondisi buruk yang dialami oleh para pekerja migran, mereka juga kesulitan mengajukan keluhan atau mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena sistem kafala yang membatasi hak-hak pekerja migran (Human Rights Watch, 2020).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena yang tidak memerlukan kuantifikasi. Dengan kata lain, peneliti berupaya untuk menjabarkan konflik yang terjadi secara mendalam. Menurut John W. Creswell dalam bukunya yang berjudul *Research Design*, metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan, menyelidiki, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana seseorang atau kelompok berkontribusi terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Merancang pertanyaan dan metodologi penelitian, mengumpulkan data khusus dari subjek, menganalisis data dengan cara yang dimulai dengan detail khusus dan kemudian menggeneralisasi, dan menafsirkan signifikansi data adalah bagian penting

dari proses penelitian kualitatif. Struktur laporan penelitian akhir dapat berupa fleksibel. Setiap individu yang terlibat dalam kerangka penelitian ini harus mengadopsi perspektif penelitian induktif, memprioritaskan perspektif individu, dan menemukan cara untuk menavigasi kompleksitas masalah (Creswell, 2013). Sehingga dalam metode penelitian kualitatif penting untuk melakukan penelitian secara mendalam, teliti, dan menyeluruh untuk dapat menjelaskan mengenai pengaruh sistem kafala terhadap hak-hak pekerja migran di Qatar menjelang piala dunia FIFA 2022.

PEMBAHASAN

Terpilihnya Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 menimbulkan kontroversi dalam sejarah sepak bola dunia. Hal ini dikarenakan negara yang hanya memiliki sekitar 2 juta penduduk dan wilayah yang cenderung tidak terlalu besar dapat terpilih menjadi tuan rumah event sepak bola terbesar di dunia yaitu Piala Dunia. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah iklim Qatar yang cenderung sangat panas. Mengingat sebagian besar peserta Piala Dunia berasal dari liga-liga Eropa yang bersuhu rendah, timbul kekhawatiran apakah kondisi ini akan mengganggu kelancaran turnamen. Hal ini menjadi bahan pertimbangan dan sorotan masyarakat global, mempertanyakan kemampuan Qatar menghadirkan Piala Dunia yang sukses di tengah tantangan cuaca ekstrem (Qatar Day, 2020). Menanggapi keraguan internasional ini, Qatar mengambil langkah inovatif dengan mengimplementasikan sistem pendingin canggih di seluruh venue pertandingan Piala Dunia 2022. Solusi teknologi ini diharapkan dapat mengatasi masalah suhu tinggi dan menjamin kenyamanan selama berlangsungnya kompetisi. Penetapan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 oleh FIFA telah memicu berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya praktik korupsi dan suap dalam proses pemilihannya. Dugaan ini melibatkan pejabat tinggi dari *Asian Football Federation* (AFC) dan FIFA. Salah satu kasus yang mencuat adalah tuduhan terhadap Jack Warner, mantan wakil presiden FIFA, yang diduga menerima dana sebesar 2 miliar dolar AS untuk mendukung terpilihnya Qatar. Sejak saat itu, berbagai

tuduhan dan kontroversi terus bermunculan, mengiringi persiapan Qatar menuju event sepak bola terbesar tersebut. Di antara berbagai isu yang muncul, perhatian dunia internasional terutama tertuju pada nasib para pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022. Kondisi kerja dan perlakuan terhadap para pekerja ini telah memicu kritik keras, dengan banyak pihak menganggap Qatar telah melanggar hak asasi manusia. Akibatnya, muncul pandangan bahwa Qatar tidak layak menjadi tuan rumah event sepak bola terbesar di dunia ini.

Nasib pekerja migran di Qatar selama Piala Dunia 2022 sungguh menyedihkan. Diperkirakan sekitar 400 hingga 500 jiwa telah melayang akibat kenyataan pahit dari pekerjaan mereka, yang ditandai dengan jam-jam melelahkan di bawah terik matahari. Gema keluhan mereka bergema melalui kisah-kisah tentang upah yang tidak dibayar dan kondisi hidup yang tidak layak (CNBC Indonesia, 2022). Sistem Kafala, yang seolah-olah mengatur dinamika antara pengusaha dan pekerja mereka, sering kali dimanipulasi, sehingga membuka jalan bagi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Kisah-kisah yang meresahkan mengungkapkan bahwa para pekerja ini tidak hanya mengalami eksploitasi tetapi juga belenggu kejam dari kerja paksa dan perlakuan tidak manusiawi, martabat mereka dilucuti dalam mengejar tontonan olahraga. Di hamparan Qatar yang disinari matahari, di mana cakrawala dihiasi oleh konstruksi ambisius yang menjulang tinggi, 2,5 juta pekerja migran bekerja keras di tengah populasi yang berjumlah 2,9 juta orang. Namun, penderitaan mereka sering kali menimbulkan keresahan, karena banyak yang menyatakan bahwa kondisi tempat mereka bekerja jauh dari memadai, terutama di bawah bayang-bayang bangunan monumental yang berdiri sebagai kemenangan sekaligus bukti usaha manusia (Arifin, 2023). Qatar tetap bersikap diam, tidak memberikan jumlah pasti pekerja asing yang tewas di wilayahnya. Sementara itu, berbagai organisasi hak asasi manusia menyatakan bahwa jumlah nyawa yang hilang dapat mencapai ribuan. Karena tantangan yang ditimbulkan oleh jam kerja terus-menerus dalam suhu yang melebihi 40 derajat Celsius, telah dilaporkan bahwa, hingga Februari 2021, terdapat 6.500 titik data dari

kedutaan besar berbagai negara mengenai pekerja yang secara tragis kehilangan nyawa mereka di Qatar sejak negara tersebut dipilih sebagai tuan rumah. Selain itu, Akomodasi atau asrama yang ditawarkan oleh perusahaan dan majikan sering kali tampak agak terabaikan dan bisa sangat sempit, terkadang menampung empat hingga delapan orang dalam satu kamar dengan tempat tidur susun. Selain itu, jalur menuju asrama cenderung dalam kondisi yang buruk, sering kali berlumpur dan tergenang air karena drainase yang tidak memadai, dan mungkin memiliki bau yang tidak sedap dari limbah (Amnesty International, 2016). Masalah-masalah ini menyoroti keadaan yang menantang yang mungkin dihadapi pekerja migran, yang dapat berkontribusi pada situasi kerja paksa (BBC News, 2022).

Sepanjang proses pembangunan untuk Piala Dunia, muncul kekhawatiran mengenai perlakuan terhadap pekerja migran di Qatar. Laporan menunjukkan bahwa beberapa pekerja menghadapi keterlambatan dalam menerima upah mereka, dan ada masalah yang terkait dengan kondisi hidup yang tidak memadai dan keselamatan tempat kerja. Selain itu, ada seruan untuk praktik kompensasi yang lebih baik. Diskriminasi upah menjadi masalah signifikan yang dihadapi oleh pekerja migran. Menurut laporan dari Amnesty International yang berjudul "Sisi Buruk dari Permainan Indah," telah disorot bahwa ada beberapa kasus di mana upah tertunda selama beberapa bulan atau, dalam beberapa kasus, tidak dibayarkan sama sekali oleh perusahaan (Amnesty International, 2016). Banyak pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan Stadion Internasional Khalifa melaporkan bahwa upah mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam kontrak kerja awal mereka (Towe, 2022). Masalah diskriminasi upah ini terkait erat dengan kasus penipuan kontrak, dan banyak pekerja migran mungkin tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka sebagai karyawan (Jureidini, 2014). Karena upah yang tidak mencukupi, pekerja migran di Qatar menghadapi tantangan dalam mempertahankan mata pencaharian mereka. Situasi ini tidak hanya menghambat kemampuan mereka untuk menghidupi keluarga secara finansial, tetapi mereka juga diharuskan membayar biaya perekrutan kepada

agen tenaga kerja di muka (Renkiewicz, 2016). Selain masalah upah, banyak pekerja konstruksi juga menghadapi tantangan terkait izin tinggal mereka. Situasi ini dapat menyebabkan status mereka di Qatar diklasifikasikan sebagai "tidak berdokumen", yang sayangnya dapat mengakibatkan para pekerja ini ditangkap oleh otoritas setempat (Ashraf, 2016).

Dalam hal tersebut, pekerja konstruksi Qatar telah mengalami berbagai ancaman dalam kelangsungan hidupnya. Pekerja konstruksi di Qatar dalam proyek pengembangan infrastruktur menjelang piala dunia FIFA 2022 melaporkan telah mengalami pelanggaran HAM yang berarti mereka tidak mendapatkan keamanan manusia sebagai individu. Keamanan manusia didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi hal-hal penting dan penting dalam kehidupan manusia dari ancaman meluas terhadap hak-hak manusia, seperti memenuhi berbagai kebutuhannya. Keamanan manusia juga didefinisikan sebagai aman dari kekerasan atau ancaman tanpa kekerasan, dan melindungi masyarakat dari ancaman yang kritis (berat) dan meluas (persuasif) (Commission on Human Security, 2003). Dalam kasus pelanggaran hak pekerja migran di Qatar, peneliti menilai bahwa pemerintah Qatar tidak *aware* dalam kondisi dan keamanan para pekerja migran selama bekerja di Qatar. Terdapat beberapa laporan bahwa para pekerja migran menghadapi keterlambatan dalam menerima upah dan bahkan ada yang tidak menerima upah. Selain itu, para pekerja migran juga dipaksa bekerja dalam kondisi tubuh yang kurang memadai sehingga membahayakan keselamatan kerja mereka. Selain masalah upah, banyak pekerja konstruksi menghadapi masalah izin tinggal. Dalam hal ini, status mereka di Qatar dapat diklasifikasikan sebagai "tidak berdokumen", yang sayangnya dapat mengakibatkan penangkapan oleh otoritas lokal.

Sebagian besar pelanggaran hak pekerja migran juga berkaitan dengan sistem Kafala yang mana membuat para pekerja migran tidak dapat menghindari ancaman *human security* nya. Dalam menganalisis fenomena pelanggaran hak pekerja migran di Qatar menjelang piala dunia FIFA 2022, penulis melakukan analisis berdasarkan *Human Security Principle and Approach* dalam mengidentifikasi masalah. Dalam *Human Security Principle*

and Approach terdapat beberapa prinsip dan pendekatan keamanan manusia seperti *people centered*, *multisectoral*, *comprehensive*, *context specific*, dan *prevention oriented*.

Pendekatan *People Centered* Pendekatan ini menekankan pada perlindungan individu daripada negara. Pendekatan ini mengakui bahwa keamanan bukan hanya tentang melindungi negara, tetapi juga melindungi individu dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Hal ini termasuk menangani masalah-masalah seperti eksploitasi seksual dan perdagangan manusia, yang sering kali menyasar populasi yang rentan (United Nations, 2016). Pemerintah Qatar telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi kerja dan kehidupan pekerja migran, seperti reformasi kebijakan izin keluar yang memungkinkan pekerja untuk meninggalkan negara tanpa persetujuan majikan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengakui hak-hak individu pekerja migran dan berusaha untuk memberikan mereka lebih banyak kebebasan dan perlindungan.

Pendekatan *multisectoral* membahas berbagai macam ketidakamanan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini mencakup keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik. Pandangan ini memastikan bahwa langkah-langkah keamanan tidak terbatas pada pertahanan militer tetapi juga mengatasi ancaman ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Multisectoral* juga Melibatkan berbagai pihak yang bekerja di bidang yang berbeda saat menangani masalah yang berkaitan dengan sektor keamanan (United Nations, 2016). Perlindungan hak pekerja migran memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, pemerintah Qatar bekerjasama dengan ILO dan Pemerintah Qatar dalam mengawasi hak-hak pekerja migran. Ketiga pihak tersebut membuat nota kesepahaman yang berbicara tentang Kerjasama di bidang penyelesaian sengketa, Dialog Sosial dan Perlindungan Upah.

Pendekatan *comprehensive* pendekatan ini mengintegrasikan pembangunan, hak asasi manusia, dan keamanan nasional. Pendekatan ini mengakui bahwa keamanan bukan hanya tentang melindungi individu,

tetapi juga tentang memberdayakan mereka untuk memenuhi kebutuhan keamanan mereka sendiri. Hal ini mencakup penyediaan akses terhadap pendapatan dasar, pekerjaan di sektor publik dan swasta, dan jaring pengaman sosial yang dibiayai pemerintah (United Nations, 2016). Berdasarkan pendekatan ini, pemerintah Qatar berupaya menerapkan undang-undang baru tentang Ketenagakerjaan yang mencakup kontrak kerja dan pemberhentian sistem kafala. Dengan menghapus sistem Kafala, yang sering kali menempatkan pekerja migran dalam posisi rentan dan tergantung pada majikan, undang-undang baru memberikan pekerja lebih banyak kontrol atas kehidupan dan pekerjaan mereka. Ini menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pekerja migran, di mana mereka dapat bekerja tanpa takut akan eksploitasi. Dengan mengatur hubungan antara majikan dan pekerja melalui kontrak kerja, undang-undang baru dapat membantu mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dalam konteks sistem Kafala. Pendekatan *comprehensive* dalam *Human Security* menekankan pentingnya pencegahan, dan dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi risiko eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja migran.

Pendekatan *context spesifik* Pendekatan ini beradaptasi dengan ketidakamanan spesifik yang dihadapi oleh komunitas-komunitas tersebut, dan memastikan bahwa langkah-langkah keamanan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hal ini termasuk menangani masalah-masalah lokal seperti kemiskinan, kekerasan etnis, dan perubahan iklim. Lalu berkonsentrasi pada tujuan utama yang diidentifikasi dalam mengidentifikasi suatu masalah. mengidentifikasi kebutuhan spesifik suatu komunitas yang terdampak dan memberikan solusi yang tepat (United Nations, 2016). Qatar memiliki iklim yang sangat panas dan kering, terutama selama musim panas. Dengan menerapkan larangan kerja di luar ruangan pada suhu tinggi, pemerintah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi lingkungan yang spesifik di negara tersebut. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi pekerja dari risiko kesehatan yang terkait dengan paparan suhu ekstrem, yang merupakan masalah nyata di Qatar.

Qatar berupaya mencegah masalah kesehatan yang dapat dialami oleh pekerja migran, seperti heat stroke, dehidrasi, dan masalah kesehatan lainnya yang terkait dengan paparan suhu ekstrem.

Pendekatan *prevention oriented* menekankan pada pencegahan dini untuk meminimalkan dampak ancaman. Pendekatan ini berfokus pada pencegahan konflik dan penanganan masalah keamanan sebelum konflik meningkat. Untuk mencegah konflik semakin meningkat pemerintah Qatar menjalin kerjasama Qatar dengan pihak FIFA untuk investigasi langsung. Investigasi langsung memberikan kesempatan untuk menilai kondisi kerja di lapangan dan memastikan bahwa standar keselamatan dan kesehatan kerja dipatuhi. Dengan pendekatan *prevention oriented*, kerjasama ini berfokus pada pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dan kondisi kerja yang tidak layak, yang dapat mengurangi risiko bagi pekerja migran. Kerjasama ini juga menciptakan transparansi dalam proses pengawasan dan akuntabilitas bagi semua pihak yang terlibat. Dengan melakukan investigasi langsung, Qatar menunjukkan komitmennya untuk bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak pekerja migran.

Secara keseluruhan, Qatar telah berupaya untuk melindungi hak pekerja migran dengan adanya revisi dan pembentukan berbagai regulasi untuk menyikapi isu yang terjadi, seperti adanya penunggakan pembayaran upah, fasilitas yang tidak layak, dipaksa bekerja dalam cuaca panas yang ekstrem, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemerintah Qatar sudah menunaikan kewajibannya untuk bertanggung jawab melindungi keamanan para pekerja migran dari ancaman yang tengah terjadi. Namun, pemerintah Qatar dianggap belum mampu sepenuhnya melindungi hak-hak pekerja migran. Sehingga membuat organisasi buruh global yang berasal dari Argentina, *Building and Wood Workers International* (BWI), mendorong pemerintah Qatar untuk membiarkan pekerja migran membentuk serikat pekerja sesuai dengan keinginan mereka karena serikat pekerja sangat penting bagi pekerja migran (Whitehead, 2022). Meskipun pemerintah Qatar telah bekerjasama dengan ILO dan Pemerintah Belanda untuk melindungi sistem upah, fakta di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian bahwa masih banyak pekerja

migran yang mengalami keterlambatan dalam penerimaan upah. Hal tersebut dibuktikan adanya pengakuan pekerja migran dari perusahaan QMC bahwa mereka belum menerima pembayaran gaji mereka dari awal 2019 hingga akhir Maret 2020. Dari total 14 perusahaan yang diteliti, hanya 3; Laing O'Rourke, Vinci, dan Besix melakukan pembayaran gaji secara transparan dan tepat waktu, sementara 11 perusahaan lainnya terlambat (Pratama, 2023). Berdasarkan informasi di atas, jelas bahwa pemerintah Qatar telah berusaha melindungi hak pekerja migran melalui UU Ketenagakerjaan dan sistem upah minimum untuk memastikan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang tidak mematuhi regulasi, sehingga hak pekerja migran untuk mendapatkan upah tepat waktu menjadi kurang terpenuhi.

KESIMPULAN

Penetapan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 oleh FIFA telah memicu berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya praktik korupsi dan suap dalam proses pemilihannya. Di antara berbagai isu yang muncul, perhatian dunia internasional terutama tertuju pada nasib para pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022. Kondisi kerja dan perlakuan terhadap para pekerja ini telah memicu kritik keras, dengan banyak pihak menganggap Qatar telah melanggar hak asasi manusia. Akibatnya, muncul pandangan bahwa Qatar tidak layak menjadi tuan rumah event sepak bola terbesar di dunia ini.

Kisah-kisah yang meresahkan mengungkapkan bahwa para pekerja ini tidak hanya mengalami eksploitasi tetapi juga belenggu kejam dari kerja paksa dan perlakuan tidak manusiawi, martabat mereka dilucuti dalam mengejar tontonan olahraga. Namun, penderitaan mereka sering kali menimbulkan keresahan, karena banyak yang menyatakan bahwa kondisi tempat mereka bekerja jauh dari memadai, terutama di bawah bayang-bayang bangunan monumental yang berdiri sebagai kemenangan sekaligus

bukti usaha manusia. 500 titik data dari kedutaan besar berbagai negara mengenai pekerja yang secara tragis kehilangan nyawa mereka di Qatar sejak negara tersebut dipilih sebagai tuan rumah. Pelanggaran hak pekerja migran di Qatar menjelang piala dunia FIFA 2022, menimbulkan beberapa spekulasi yang buruk sehingga berdampak bagi identitas negara Qatar.

Pemerintah Qatar telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi hak pekerja migran dari ancaman kemanan manusia yang berlandaskan 5 *Human Security : Human Security Principle and Approach* yang meliputi *people centered, multisectoral, comprehensive, context spesific, dan prevention oriented*. Upaya pemerintah tersebut yaitu, reformasi kebijakan izin keluar yang memungkinkan pekerja untuk meninggalkan negara tanpa persetujuan majikan, melakukan sejumlah reformasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran, termasuk penghapusan sistem kafala dan penerapan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih baik, melakukan kerjasama dengan pihak FIFA untuk investigasi langsung apa yang terjadi di lapangan. Selain itu, pemerintah Qatar juga bekerjasama dengan organisasi internasional ILO dan pemerintah Belanda dalam mengawasi hak pekerja migran.

Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Qatar belum sepenuhnya mengatasi isu pelanggaran hak pekerja migran. Seperti, walaupun pemerintah Qatar telah berupaya membuat kebijakan dan regulasi baru mengenai kesejahteraan ketenagakerjaan, ternyata masih banyak kasus penunggakan penerimaan upah para pekerja migran. Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Qatar, para pekerja migran belum sepenuhnya dapat menikmati hak mereka.

Daftar Pustaka

- Aljazeera. (2022). *Qatar 2022: The Economic Impact of the World Cup*. Aljazeera. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/economy/2022/11/11/qatar-2022-the-economic-impact-of-the-world-cup>
- Amnesty International. (2016). *The Ugly Side of the Beautiful Game*. London: Amnesty International.
- Amnesty International. (2020). *Qatar: Shattered Dreams: Exploitation of Migrant Workers on a Mega Project in Qatar*. Amnesty Internasional. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/0610/2019/en/>

- Amnesty International. (2021). *Qatar: Reality Check 2021*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/4966/2021/en/>
- Arifin, Y. (2023). *Puluhan buruh migran piala dunia 2022 mengaku dieksploitasi*. Retrieved from <https://sport.detik.com/sepakbola/gila-bola/d-6773554/puluhan-buruh-migran-piala-dunia-2022-mengaku-dieksploitasi>
- Ashraf, I. (2016). Emerging Issues: FIFA World Cup 2022: Enjoying the Game at the Suffering of Migrant Workers. *University of Baltimore Journal of International Law*, 139.
- BBC News. (2022). *Forced labor at World Cup Stadium*. BBC News. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35931031>
- Brannagan, P. M. (2016). Sports Mega-Events, Soft Power and Soft Disempowerment: International Supporters' Perspectives on Qatar's R2018 and R2022 FIFA World Cup Bidding Campaigns. *International Journal of Sport and Politics*.
- CCOE. (2019). *Concepts, Interopability and Capability Branch*. Retrieved from <https://www.cimic-coe.org/resources/fact-sheets/factsheet-human-security>
- CNBC Indonesia. (2022). *Alert! 400-500 orang tewas karena piala dunia Qatar, kenapa?* CNBC Indonesia. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221130122255-4-392474/alert-400-500-orang-tewas-karena-piala-dunia-qatar-kenapa>
- Commission on Human Security. (2003). *Human security now : protecting and empowering people / Commission on Human Security*. New York: The Commission.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan kuallitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dorsey, J. M. (2022). The Qatar World Cup: Footballing for soft power. *The Hague Institute for Global Justice*.
- Human Rights Watch. (2019). *Qatar: Events of 2019*. Human Rights Watch. Retrieved from <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/qatar>
- Human Rights Watch. (2020). *Qatar: Little Progress of Protecting Migrant Workers*. Human Rights Watch. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2020/08/25/qatar-little-progress-protecting-migrant-workers>
- Jureidini, R. (2014). Migrant Labour Recruitment to Qatar: Report for Qatar Foundation Migrant Worker Welfare Initiative. *Bloomsbury Qatar Foundation Journals*.
- Khatib, L. (2013). Qatar's foreign policy: the limits of pragmatism. *International Affairs*, 417-431.
- Mayne, N. H. (2010). *FIFA WORLD CUP 2022™: Bid Evaluation Report*. Switzerland: FIFA.
- Owens, J. (2021). *Report: More than 6.400 migrant workers have died during Qatars World Cup prep*. Retrieved from <https://sports.yahoo.com/report-more-than->

6500-migrant-workers-have-died-during-qatars-world-cup-prep-043412847.html?guccounter=1,

- Pratama, Y. A. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Piala Dunia Qatar 2022. *Glocal Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 66-92.
- Qatar Day. (2020). *FIFA World Cup 2022 Costs & Budget Overview*. Qatar Day. Retrieved from <https://www.qatarday.com/blog/information/fifa-world-cup-2022-costs-budget-overview/70204>
- Renkiewicz, P. (2016). Sweat Makes the Green Grass Grow: The Precarious Future of Qatar's Migrant Workers in the Run up to the 2022 FIFA World Cup Under the Kafala System and Recommendations for Effective Reform. *American University Law Review*, 735.
- The Guardian. (2021). *Revealed: 6.500 migrant workers have died in Qatar since World awarded*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022>
- Towe, E. (2022). A Country Prosperin on Abuse: Migrant Worker Exploitation and Lbor Reform in Qatar. *Marketing Undergraduate Honor Theses*, 11.
- United Nations. (2016). *An integrated approach for the realization of the Sustainable Development Goals and the priority aread of the international community and the United Nations system*. Human Security Unit.
- Wawan. (2022). Dinamika Sistem Perburuhan (Kafala) di Qatar. *FISIP UNWIR*, 109-110.
- Whitehead, J. (2022). *Trade union in Qatar wwarns about lack of change for migrant workers*. The Atlantic. Retrieved from <https://theathletic.com/3910236/2022/11/18/tradeunion-in-qatar-warns-there-is-no-sign-that-sustainable-change-is-comingfor-migrant-workers/>